

JALAN TERJAL UINSA MENUJU WORLDCLASS UNIVERSITY

IMAM GHAZALI SAID*

*Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

DINAMIKA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya bergerak cepat. *Tagline* UINSA 'Building Character Qualities' yang ditancapkan Rektor UIN-SA Prof Dr H. Abd A'la, cukup menjadi spirit seluruh civitas akademika. Memasuki usia 'emas', UIN-SA - yang berdiri sejak tahun 1965 dengan nama Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel (IAIN Sunan Ampel) -- semakin mantap melangkah untuk menggapai predikat universitas Islam bertaraf internasional, *World Class Islamic University*.

Tantangan ke depan semakin besar. Walaupun demikian, kerja keraskita saat ini "tidak punya arti apa-apa" jika dibandingkan dengan perjuangan dan kerja keras para pendahulu kita. UINSA yang sekarang tampak 'gagah perkasa' ini, jelas tidak bisa dipisahkan dari perjalanan panjang nan terjal yang telah dilalui dengan susah payah oleh mereka. Sejarah ini tidak boleh tergerus oleh hiruk pikuk menyambut predikat sebagai universitas Islam kelas dunia.

Keberadaan UINSA tidak lepas dari akar perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana kita tahu, semangat nasionalisme itu mengerucut kepada dua kekuatan besar di negeri ini. *Pertama*, kaum nasionalis Muslim

(muslim *nasionalis*) yang diwakili NU dan Muhammadiyah, *kedua*, kaum nasionalis sekuler yang kala itu diwakili Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didukung oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kini dikenal dengan sebutan TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Pada awal kemerdekaan Republik ini, terjadi revalitas atau 'rebutan' pengaruh. Kekuatan Islam terdesak miring. Banyak aspirasi kaum Muslim nasionalis yang tidak terwadahi, termasuk di antaranya adalah Piagam Jakarta atau 'Jakarta Charter' yang kini menjadi dokumen historis yang berujung pada rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Ini salah satu bentuk kompromi antara pihak nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler demi NKRI. Sementara menurut ideologi kalangan Ormas Islam di luar NU dan MD saat itu bahkan sampai sekarang menilai "bahwa tujuh kata;'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya' itu sebagai kekalahan politik kaum Muslim Indonesia, yang sewaktu-waktu bisa diperjuangkan kembali.

'Kekalahan' kaum nasionalis Muslim ini membuat suasana sedikit gerah. Bagaimana mungkin kaum Muslim yang mayoritas tidak terwadahi aspirasinya. Disadari atau tidak, ini menimbulkan "kecemburuan politik". Apalagi kenyataannya, pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) aspirasi kaum Muslim sudah diperhatikan. Jepang menerapkan kebijakan yang dalam konteks ini menguntungkan kaum Muslim. Balatentara Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas kaum Muslim. Oleh karena itu, Jepang meletakkan kebijakan dasar untuk menjaga dan membina kawasan teritorialnya, dikenal dengan kebijakan *Nippon's Islamic Grass Root Policy* – kebijakan politik Islam ala Jepang ini bertujuan

‘mengeksplorasi’ potensi kaum Muslim desa yang secara tradisional sangat patuh pada ulama dan kiainya.

Singkat cerita, dibentuklah *Shumubu* – Kantor Urusan Agama oleh Jepang, yang dipimpin Kolonel Horie, pada akhir Maret 1942. Terlihat betapa cepatnya bala tentara pendudukan mengambil kebijakan politik dengan mendirikan *Shumubu*. Dengan demikian tampak jelas, bahwa Jepang telah lama memprogramkannya, agar penjajah ini mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Ketika *Shumubu* dipimpin tentara Jepang, dan tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan, maka Kolonel Horei digantikan oleh Dr. Hoesein Djajadiningrat (bumi putera Indonesi pertama yang memperoleh gelar doktor pertama bidang studi Islam dari Universitas Leiden Belanda). Sebagai pakar agama Islam, yang tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, Hoesein pun tidak mempunyai pengaruh pada umat. Oleh karena itu, diadakan reorganisasi *Shumubu* dengan menggantikan Ketua *Shumubu* tersebut dengan KHM Hasyim Asy’ari. Padahal, tokoh kharismatik ini baru saja keluar dari penjara kalisosok, karena menolak menjalankan saikerei yaitu cara menghormat dengan membungkuk ke arah Tokyo sebagai lambang ketundukan pada kaisar Jepang Tennoheka, maka aktivitas harian *Shumubu* diserahkan kepada wakilnya yang kebetulan putera sulungnya KH A. Wachid Hasyim.

Membaca fakta sejarah seperti ini, mau tidak mau kaum nasionalis sekuler harus mengakomodasi kepentingan kaum Muslim. Bukan saja karena jumlah mereka mayoritas, tapi lebih dari itu jasanya tak kalah besar dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. ‘Disparitas politik’ seperti ini bisa menimbulkan gesekan. Maka, untuk menjaga keseimbangan politik agar negara yang baru berdiri itu kokoh, maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Kementerian baru dengan

nama Departemen Agama (Depag) dengan mengangkat H.M. Rasjidi, BA sebagai Menteri Agama pertama. Beliau setelah tidak jadi Menteri Agama meneruskan karir akademiknya sehingga menggapai gelar Prof. Dr. yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah seorang pemikir muslim Indonesia terkemuka.

Setelah itu terpikir lembaga pendidikan. Kalau kampus Universitas Gajah Mada misalnya dimaknai sebagai hadiah kepada kaum nasionalis sekuler yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1950. Lalu apa yang diberikan kepada kaum nasionalis Muslim ? Akhirnya tiga jurusan Agama; Dakwah (kelak menjadi Fakultas Ushuluddin), Qodlo (menjadi Fakultas Syariah) dan Pendidikan (menjadi Fakultas Tarbiyah) di bawah UII (Universitas Islam Indonesia) yang swasta itu dinegerikan mejadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) ini dimaknai sebagai hadiah kepada kelompok nasionalis Muslim. "Hadiah" ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 34 tanggal 26 September Tahun 1951. Sementara di Jakarta , berdasarkan Penetapan Menteri Agama No 01 Tahun 1957 Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) secara resmi didirikan. PTAIN dan ADIA ini secara simbolik dimaknai sebagai dua Lembaga Pendidikan Tinggi yang merepresentasikan cita-cita komunitas Muslim nasionalis agar setara dengan komunitas nasionalis sekuler dalam mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi.

Perkembangan selanjutnya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta dengan rektor Prof. Mahmoed Joenes dan PTAIN di Yogyakarta dengan rektor Prof. KH R. Moehamad Adnan ini mejadi embrio berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang kemudian masing-masing diberi nama Syarif Hidayatullah dan Sunan Kalijaga. Dua rektor ini rela

untuk tidak mendapatkan tunjangan structural dalam memimpin dua lembaga Pendidikan Tinggi Islam ini. Sampai dengan tahun 1960-an mereka berjibaku mempertahankan dua lembaga tersebut. Tahun 1959 Presiden Soekarno mengangkat KH Muhammad Wahib Wahab sebagai Menteri Agama Kabinet Kerja I & II, untuk periode 1959-1962. Putra pertama KH Wahab Hasbullah ini memiliki keinginan kuat untuk ‘mengubah’ nasib ADIA (yang masih swasta untuk dinegerikan), agar mendapat perhatian dan anggaran dari pemerintah.

Perjuangan beliau tidak mudah. Karena Presiden Soekarno tidak berkenan, dengan berbagai pertimbangan, di antaranya keuangan negara yang masih cekak. Tetapi, dalam benak Kiai Wahib Wahab, lembaga pendidikan Islam harus memperoleh perlakuan yang sama, sebagaimana universitas umum selama ini. Pada saat yang sama, suhu politik masih ‘adem panas’. Tahun 1957, Presiden Soekarno menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaya menjadi Perdana Menteri. Beliau dibantu tiga orang wakil (Mr. Hardi dari PNI, Haji Idham Chalid dari NU, dan dr. J. Leimena dari Parkindo). Tugas PM. Ir Djuanda sungguh berat karena pada saat itu, keadaan bangsa dan negara dalam situasi berbahaya, terancam perpecahan. Tetapi Djuanda berhasil menyelenggarakan musyawarah nasional memperkuat kembali Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta.

Dalam kondisi demikian, nasib Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) semakin tidak jelas. Bung Karno tetap bersikukuh tidak mengizinkan ADIA menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Tetapi keinginan Kiai Wahib Wahab masih begitu kuat. Nah, ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Jepang, di mana Ir Djuanda menempati posisi sebagai presiden *ad-interim* saat itu, usulan tersebut kembali disampaikan. Dan Alhamdulillah, ternyata Ir Djuanda yang pernah menjabat

sebagai Direktur SMA Muhammadiyah Jakarta, ini menyeturkannya. Persetujuan ini dibuktikan dengan Peraturan Presiden No 11 Tahun 1960 yang ditanda tangani oleh Pejabat Presiden Ir. Djuanda.

Bagaimana reaksi Bung Karno? Beliau sempat marah. Di hadapan Ir Djuanda dan Kiai Wahib Wahab, Bung Karno mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak setuju ADIA itu menjadi negeri. Tetapi, setelah dijelaskan dengan seksama, termasuk perlunya keseimbangan antara kekuatan nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler, maka, Bung Karno pun luluh. Dengan demikian, Peraturan Presiden No: 11 Tahun 1960 yang secara eksplisit merubah ADIA di Jakarta menjadi IAIN Syarif Hidayatullah dan PTAIN di Jogjakarta menjadi IAIN Sunan Kalijaga efektif berlaku. Jadi saat itu ada dua IAIN; di Jogjakarta dan Jakarta, yang populer dengan dua IAIN Induk. Ini, karena IAIN yang secara pesat berdiri di beberapa daerah provinsi harus menginduk pada salah satu dari dua IAIN ini.

Antara 1960-1965 suasana sosial politik di tanah air cukup ‘panas’, karena Presiden Soekarno membubarkan partai Masyumi, karena pentolan partai ini dianggap terlibat pemberontakan. Dalam waktu yang sama PKI (Partai Komunis Indonesia) mendukung pemerintah. Sementara PNU (Partai Nahdlatul Ulama) yang saat itu menjadi representasi partai Islam ‘dirangkul’ Soekarno. Dalam konteks inilah Soekarno berkeinginan menyatukan tiga kekuatan ideologi penyangga NKRI ; nasionalisme, agama dan komunisme. Gagasan Soekarno inilah saat itu populer dengan Nasakom, yang ditandai revalitas antara kelompok agama yang diwakili NU dan kelompok komunis yang diwakili PKI.

Dalam suasana ‘tensi politik yang memanas’ KH Saifuddin Zuhri, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merangkap Pemimpin Redaksi *Harian Duta*

Masyarakat dan anggota Parlemen Sementara dipanggil Bung Karno. Saat itu hari Jumat, tanggal 17 Februari 1962, ia diminta menghadap ke Istana Merdeka. Banyak teka-teki memenuhi benaknya ketika dia memenuhi panggilan Bung Karno. Apakah karena urusan DPR atau DPA? Apa urusan NU? Atau urusan surat kabar *Duta Masyarakat*? Ternyata dalam pertemuan itu Bung Karno minta KH. Saifuddin Zuhri agar berkenan menjadi Menteri Agama, menggantikan KH. Wahib Wahab yang mengundurkan diri.

Terjadilah estafet kepemimpinan di Departemen Agama. Kiai Saifuddin berhasil meneruskan cita-cita Kiai Wahib Wahab. Tahun 1965, ketika negeri ini digoyang paham komunis, Kiai Saifuddin terus mengimbangi politik PKI. Ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil mendirikan universitas rakyat di beberapa kota besar, Kiai Saifuddin tak mau kalah, IAIN induk diperluas hingga mencapai 14 provinsi. IAIN induk ini diberi keleluasaan untuk membuka Cabang di berbagai kotamadya dan kabupaten. Kebijakan ini berlaku sepanjang KH Saifuddin Zuhri menjabat Menteri Agama (1962-1967).

Tiga fakultas : Syariah di Surabaya, Ushluddin di Kediri dan Tarbiyah di Malang yang selama lima tahun menjadi cabang IAIN Sunan Kalijaga menjadi modal bagi berdirinya IAIN induk di Surabaya. Untuk merealisasikan keinginan kuat masyarakat Muslim Jawa Timur agar bisa "memiliki" Perguruan Tinggi Islam Negeri yang independen, ulama dan tokoh masyarakat melakulkan serangkaian pertemuan, diantaranya adalah pertemuan 1961 di Jombang dengan menghadirkan Prof. Soenarjo rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai nara sumber. Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan; (1) membentuk panitia perintis yang dipimpin KH Mahrus Aly Lirboyo (2) mendirikan 3 tiga fakultas: Syariah di Surabaya,

Tarbiyah di Malang dan Ushuluddin di Kediri. Untuk sementara tiga fakultas ini menjadi cabang IAIN Jogya. Keputusan ini ditindak lanjuti dengan pendirian Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan pada tanggal 9 Oktober 1961 yang dipimpin KH Mahrus Aly dengan beberapa anggota, diantaranya KH Achmad Shiddiq Jember, KH Mustain Romly Jombang, H. Yahya Hasyim H. Yasin, dan H. Imam Soepardi Surabaya. Yayasan ini punya tugas berat menyediakan lokasi tanah minimal 9 hektar dan menyiapkan perumahan bagi para guru besar. Sementara pada masa transisi antara 1960-1965 kegiatan akademik Fakultas Syariah di Surabaya dilakukan dengan menumpang di Taman Pendidikan Puteri Nahdlatul Ulama (TPPNU) Khadijah. Atas modal dan langkah-langkah strategis di atas, maka KH Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama menerbitkan SK No 20/1965 tentang berdirinya IAIN Sunan Ampel di Surabaya, pada 5 Juli 1965.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa keinginan untuk mendirikan IAIN Sunan Ampel lebih dominan muncul dari masyarakat bawah yang direspon secara positif dan bijak oleh pemerintah; dalam hal ini Departemen Agama.

IAIN Sunan Ampel Surabaya pun membawahi banyak cabang, seperti NTB, Bangkalan, Pamekasan, Tulungagung, Ponorogo, Kediri, Malang, Samarinda (Kalimantan). Problem berikutnya adalah bagaimana kelangsungan proses belajar mengajar di tengah dana yang cupet dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Di sinilah tampak jelas, *ghirah* perjuangan para ulama dan kiai saat itu. Tidak mudah bagi Menteri Agama menunjuk seorang rektor. Walhasil, untuk IAIN Sunan Ampel, ditunjuklah Prof H Tengku Ismail Ya'kub SH, MA sebagai rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya pertama (1965-1972).

Kiai-kiai juga didapuk menjadi dosen, seperti KH Nawawi (Surabaya), KH Manfudz Anwar (Jombang). Mereka semua tidak dibayar. Sarana prasarana juga terbatas. Sebelum IAIN memiliki lahan sendiri, perkuliahan berlangsung di Taman Pendidikan Putri Khadijah, yang disingkat TPP Khadijah terletak di Jalan Semea Surabaya. Begitu juga IAIN Cabang Bojonegoro, saat itu menempati tanah milik Lembaga Pendidikan Maarif, dan sekarang difungsikan sebagai Rumah Sakit dan kantor Muslimat NU.Bojonegoro.

Demi kelangsungan IAIN, kiai pantang menyerah, termasuk mengorbankan dana. Dibentuklah Badan Wakaf, di antaranya terdapat nama KH Mahrus Aly (Lirboyo Kediri), KH Achmad Shiddiq (Jember) dan seorang ulama muda KH Musta'in Romly (Jombang). Kampus UINSA yang sekarang ini berdiri di atas tanah seluas 8 hektar dari 9 hektar, berstatus wakaf. Di antaranya tanah wakaf dari KH Saifuddin Zuhri. Itulah sebabnya, mengapa pembebasan lahan depan (sekitar 1 hektar) sebagai *Frontage Road* (FR) sempat menjadi perdebatan.

Memasuki orde baru, Presiden H.M Soeharto mengamanatkan jabatan Menteri Agama kepada KH Muhammad Dahlan (1967-1971). Kiai kelahiran Mandaran Rejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur (2 Juni 1909), pendiri Muslimat NU itu dikenal sebagai pelopor musyawarah antarumat beragama, sebagai gerakan untuk meminimalisir peristiwa intoleransi antarumat beragama menyusul peristiwa PKI.

KH Muhammad Dahlan menghadapi problem yang sama, lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang berbasis akademis. Sampai tahun 1967, IAIN Surabaya hanya memiliki satu dosen yang berstatus sarjana, beliau adalah Drs Abdul Djabbar Adlan Aly. Kiai Dahlan harus berpacu mencari orang-orang yang berpotensi mengelola IAIN. Akhirnya bertemu

dengan Prof. Dr. Harun Nasution yang sama-sama pernah (lama) belajar di Mekah al-Mukarromah. Setelah meraih gelar doktor di Universitas McGill di Kanada, maka, pada tahun 1969 diminta menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah.

Bagaimana dengan IAIN Sunan Ampel Surabaya? Di sini Prof. Dr. Harun Nasution ikut membantu Menteri Agama KH Muhammad Dahlan mencari sosok yang tepat mendampingi Prof H Tengku Ismail Ya'kub SH, MA sebagai rektor IAIN Sunan Ampel. Akhirnya muncullah nama Prof KH.A. Syafii A. Karim (alumni Baghdad) yang kemudian menjabat sebagai rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya (1972-1974). Sampai era Prof KH.A. Syafii A. Karim, kondisi IAIN Sunan Ampel masih 'babat alas'. Memang sudah ada gaji, ada fasilitas, tetapi sangat terbatas. Misalnya ada fasilitas rumah di Jalan Tales, Surabaya. Saat itu, jumlah fakultas juga masih terbatas, hanya Fakultas Syariah yang dipimpin Kiai Syafii A. Karim dan Fakultas Ushuluddin oleh KH Mahfudz Anwar (Jombang).

Tahun 1971 Presiden Soeharto mengganti Menteri Agama dari KH Muhammad Dahlan kepada Abdul Mukti Ali. Lelaki kelahiran Cepu, Blora, Jawa Tengah, 23 Agustus 1923 itu memiliki nama kecil Soedjono (Sujono). Sedangkan nama Abdul Mukti Ali didapat dari gurunya, KH. Hamid Pasuruan (wikipedia).

Hebatnya, meski sudah berganti-ganti menteri, semangat para pendahulu terhadap IAIN masih begitu tinggi. Sampai tahun 70-an Kiai Saifuddin Zuhri masih konsisten memikirkan lembaga ini, sampai beliau dijuluki sebagai pelopor pengembangan IAIN. Beliau terus mencari 'bibit unggul' untuk membantu pengembangan IAIN. Ada peristiwa menarik, ketika Kiai Saifuddin Zuhri berkunjung ke Kalimantan, beliau bertemu dengan Drs. Marsekan Fatawi yang kemudian menjadi rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya (1975-1987). Di

mata Kiai Saifuddin, sosok Pak Marsekan dikenal sebagai mahasiswa yang gigih dan kirtis. Ia pernah mendemonya saat masih menjadi Menteri Agama. Tetapi, di benak Kiai Saifuddin tidak ada dendam sedikitpun, sehingga saat itu Pak Marsekan – yang menjelaskan dirinya sebagai Putra Lamongan dan santri Tebuireng - diminta kembali ke Surabaya untuk memperkuat IAIN. Dari seluruh perjalanan ini, semakin meneguhkan bahwa IAIN berdiri tegak di atas tradisi pesantren.

Tantangan UINSA ke Depan

Cita-cita untk “memiliki” Peguruan Tinggi Islam setingkat unversitas secara implisit sudah tampak sejak awal. Ini diketahui dari terjemah IAIN dengan “al-Jami’ahIslamiyah al-Hukumiyah”. Jika ini diterjemah sekarang adalah Universitas Islam Negeri-bukan IAIN. Kiranya para perintis IAIN menyadari bahwa berjuang untuk IAIN saja sulit, apalagi UIN. Kiranya mereka berprinsip padapada kaidah ushul Fiqh: Sesatu yang tidak bisa dicapai semua tidak ditinggalkan semua.Ekspektasi kaum Muslim terhadap IAIN begitu besar. Harapan IAIN mampu mengeluarkan *output* berupa individu-individu yang matang di sisi intelektual dan matang dalam bidang keagamaan, harus diakui masih *jauh panggang dari api*. Harus ada terobosan untuk menjawab tuntutan umat.

Sesungguhnya, tahun 1970-an – Prof. Dr Harun Nasution dan Menteri Agama Prof. Dr .H.A Mukti Ali -- sudah meluncurkan gagasan agar IAIN bertransformasi menjadi universitas, sesuai cita-cita perintis dan pendirinya. Tetapi gagasan itu selalu kandas di tengah jalan. Melalui proses panjang dan melelahkan, akhirnya IAIN benar-benar dikonversi menjadi universitas melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2002 yang menjadi dasar berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Jakarta pada

tanggal 20 Mei 2002. Dua tahun kemudian IAIN Jogya menjadi UIN, dan terus terjadi transformasi di beberapa IAIN menjadi UIN, seperti Malang, Makasar, Aceh, Sumatera Utara, Pekanbaru, dan lain- lain yang sampai 2014 Indonesia mempunyai 11 UIN, 25 STAIN dan 19 STAIN.

Tahun 2009 IAIN Sunan Ampel Surabaya, setelah melalui serangkaian perdebatan dan diskusi, mengajukan perubahan menjadi UIN kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Empat tahun kemudian, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 65 tanggal 1 Oktober 2013, menyetujui perubahan tersebut. Kemudian perubahan menjadi UINSA ini diluncurkan pada 4 Desember 2013.

Konversi IAIN menjadi UIN bukanlah sekadar proyek fisik, dengan hanya mengubah struktur gedung menjadi lebih luas, lebih gagah dan mentereng seperti yang kita saksikan sekarang. Tujuan pokok dari perubahan ini adalah pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata pikir keilmuan yang bernafaskan keagamaan sesuai dengan tuntutan umat Islam. Tradisi keilmuan yang diidolakan UINSA adalah berjejaringnya semua disiplin ilmu yang secara garis besar ada dua disiplin ilmu yang harus dikembangkan: ilmu agama (ilmu dasar) dan sains teknologi (ilmu pokok). Dua arus ilmu ini harus terus berjalan secara dinamis dan terintegrasi. Pola kaitan dua ilmu seperti di atas di UINSA dilambangkan dengan dua Menara Kembar, yang antara satu menara dengan menara di sebelahnya terhubung dengan bangunan kokoh yang tak memungkinkan dua menara kembar itu dipisah. Dua Menara Kembar di kalangan civitas akademika UINSA populer dengan pengembangan ilmu dengan pola Twin Tower yang dalam bentuk fisiknya dapat kita nikmati dari bangunan megah yang

akan diresmikan bersamaan dengan peringatan UINSA EMAS yang akan datang.

Sebagai konsekuensi transformasi IAIN menjadi UIN, universitas ini memiliki 9 Fakultas, yaitu ; Adab dan Humaniora, Syariah dan Hukum, Ushuluddin dan Filsafat, Dakwah dan Komunikasi, Tarbiyah dan Keguruan, Sosial Politik, Ekonomi dan BisnisIslam, Sain dan Teknologi, Psycnologi dan Ilmu Kesehatan. Dari 9 Fakultas ini UINSA memiliki 47 prodi. Insya Allah ke depan UINSA akan meningkat terus kegiatan akademiknya yang diimplementasikan dengan menambah Fakultas dan Prodi. Jika kita perhatikan nama fakultas di bawah UIN menggunakan kata sambung “dan”. Misalnya, Fakultas dan Humaniora, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan seterusnya. Ini, mengandung maksud bahwa setiap fakultas, terutama fakultas-fakultas agama mendapatkan kesempatan untuk membuka prodi umum.

Fakultas Adab dan Humaniora (FAHUM) UINSA

Seiring dengan transformasi IAIN menjadi UIN Sunan Ampel maka Fakultas Adab dan Humaniora harus melakukan langkah-langkah tepat untuk menjawab tuntutan umat Fakultas Adab yang berdiri dan diresmikan oleh Menteri Agama Prof. KH. Saifdin Zuhri pada 11 Rajab 1388 H bertepatan dengan 26 Oktober 1966 ini termasuk fakultas pertama setelah IAIN Sunan Ampel menjadi induk terlepas dari IAIN Sunan Kalijaga Jogja. Oleh karena itu, penguatan SDM harus menjadi prioritas utama. Sampai sekarang FAHUM masih menjadi ‘pemasok’ terbanyak Guru Besar, (Professor) dan Doktor di UINSA. Dari 37 Profesor UINSA, 11 dari Fahum, dengan rincian 5 Profesor dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam, 5 Profesor dosen Bahasa dan Sastra Arab,

dan seorang profesor dosen Bahasa dan Sastra Inggris. Target berikutnya FAHUM berusaha untuk memiliki Program Pasca Sarjana sendiri linier dengan prodi pada Strata Satu. Upaya ini dimungkinkan, karena tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) UINSA.

Begitu juga soal program studi (Prodi), FAHUM yang sekarang hanya memiliki tiga Prodi (Bahasa dan Sastra Arab, Sastra Inggris dan Sejarah Kebudayaan Islam) akan ditambah dengan tiga prodi baru, Perpustakaan, Pariwisata Islam dan Bahasa Indonesia. FAHUM sudah tidak menerima tenaga dosen S1, hanya menerima minimal S2. Di samping kualitas, FAHUM juga memperbanyak doktor-doktor baru. Setiap tahun minimal ada 2 lulusan doktor baru, baik lulusan Timur Tengah maupun Barat. Dengan demikian, kampus ini benar-benar akan mampu menjadi *World Class Islamic University*, dan *Fakultas Adab dan Humaniora* menjadi salah satu penyangga dan pendorong terpentingnya.. *Semoga bermanfaat untuk umat! Amin. (*)*